



Munich Personal RePEc Archive

**PERSISTANCE OF REGIONAL
INFLATION IN SOUTH SULAWESI
INDONESIA**

Iskandar, Azwar

1 June 2017

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82693/>
MPRA Paper No. 82693, posted 14 Nov 2017 23:25 UTC



PERSISTENSI INFLASI REGIONAL DI SULAWESI SELATAN

Azwar
Balai Diklat Keuangan Makassar
Email : azwar.iskandar@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
25 November 2016

Dinyatakan Diterima

KATA KUNCI:
persistensi, inflasi, Sulsel.

KLASIFIKASI JEL:
E31.

ABSTRAK

The objective of this study is to measure the persistence of inflation level in South Sulawesi. In addition, this study intends to find out the source of inflation persistence. The analysis of the regional inflation behavior developed in this paper is explored to commodities level. Using quarterly data from Bank Indonesia from 2006.I to 2015.III, this study was conducted to make estimation by applying Univariate Autoregressive (AR) Model. The empirical result indicates that the level of inflation persistence in South Sulawesi is relatively high. This result indicates that inflation requires a long time to return to its natural value after shocks. The high degree of inflation persistence reflected by the length of the time period required to absorb of 50% of shocks occurred before returning to its natural value i.e. 13 months. Using the estimation results of Partial Adjustment Model (PAM), it shows that high inflation persistence in South Sulawesi mainly caused by inflation rate of groups of prepared food as proxy of volatile foods group and housing, water, electrical, gas and fuel as proxy of administered price group. Moreover, the existence of TIPD in South Sulawesi as an effort to coordinate monetary and regional fiscal policy in order to control the regional inflation, proved has a negative effect on regional inflation in South Sulawesi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan dan kontribusi persistensi inflasi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peranan TPID menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan data *time series* triwulanan tahun 2006.I s.d. 2016.I yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, penelitian ini mencoba mengestimasi dengan pendekatan *Univariate Autoregressive (AR) Model*. Penelitian ini membuktikan bahwa Inflasi di Sulawesi Selatan memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya *shock*. Tingginya derajat persistensi inflasi Sulawesi Selatan tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% *shock* yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi Sulawesi Selatan untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 13 bulan. Dengan model *Partial Adjustment Model (PAM)* diketahui bahwa persistensi inflasi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh *shock* yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebagai kelompok *administered price* dan kelompok bahan makanan sebagai kelompok *volatile foods*. Selain itu, keberadaan TIPD di Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan.

1. PENDAHULUAN

Inflasi sebagai salah satu masalah makroekonomi selalu menjadi perhatian, khususnya dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional dan regional. Nopirin (1994) mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu.¹ Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali bila kenaikan harga itu meluas kepada barang-barang yang lain.

Perubahan perilaku inflasi dapat terjadi karena timbulnya perubahan substansial ataupun *shock* dalam perekonomian. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi perilaku pembentukan harga yang dapat berdampak terhadap perilaku inflasi. Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat persisten atau berlangsung dalam kurun waktu lama. Reaksi yang diberikan dalam mengatasi perubahan/*shock* dan perencanaan ke depan memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai seberapa besar dan lama *shock* yang terjadi mempengaruhi perekonomian.

Marques (2004) mendefinisikan persistensi inflasi sebagai kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu *shock*.² Derajat persistensi yang tinggi menunjukkan lambatnya tingkat inflasi ke tingkat alamiahnya. Sebaliknya derajat persistensi yang rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat alamiahnya. *Shock* dimaksud antara lain dapat berupa kebijakan pemerintah, gangguan distribusi, bencana alam dan perubahan cuaca. Oleh karenanya, perilaku inflasi penting untuk dipelajari dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan atas respon dari perubahan tekanan terhadap inflasi agar pengendalian inflasi lebih efektif.

Mengingat inflasi nasional pada dasarnya merupakan gabungan dari inflasi di seluruh daerah, maka untuk tujuan pengendalian inflasi nasional perlu diperoleh gambaran yang utuh mengenai perilaku inflasi daerah. Untuk itu, mempelajari persistensi inflasi pada lingkup regional atau daerah dan mengetahui penyebabnya penting untuk banyak dilakukan di berbagai daerah dengan pertimbangan bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan pengendalian inflasi yang berbeda pula. Wimanda (2006) menyatakan bahwa antara inflasi-inflasi daerah dengan inflasi nasional tidak menunjukkan adanya konvergensi sehingga pola pergerakannya seringkali berbeda dari pergerakan inflasi nasional.³ Hal inilah yang dapat mengakibatkan kebijakan moneter tidak sepenuhnya efektif dalam menekan laju inflasi di daerah, sehingga inflasi daerah perlu dikaji secara khusus. Begitu pula, Carlino dan Defina (1998) menyatakan bahwa secara teoritis kebijakan moneter merupakan kebijakan yang bersifat skala nasional, namun dalam realitasnya, terjadi divergensi daerah dalam merespon *shocks* dari variabel agregat ekonomi tersebut.⁴

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat persistensi inflasi di Indonesia. Hasil studi Yanuarti (2007) dan Alamsyah (2008) misalnya menyimpulkan bahwa derajat persistensi inflasi di Indonesia secara umum sangat tinggi namun cenderung menurun pada periode setelah krisis.^{5,6} Sementara itu, Harmanta (2009) menyatakan bahwa persistensi inflasi yang bersifat *backward looking* pada era *Inflation Targeting Framework* (ITF) mengalami penurunan, sementara yang bersifat *forward looking* mengalami peningkatan. Namun demikian, kajian tersebut perlu didukung oleh kajian yang bersifat regional, dalam arti melihat lebih dalam persistensi inflasi di tingkat regional.⁷ Pada lingkup regional, Arimurti (2011) melakukan penelitian persistensi inflasi di Jakarta.⁸ Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat

¹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPFE, 1994.

² Carlos Robalo Marques, *Inflation Persistence: Facts Or Artefacts?*, *Working Paper Series* no. 371, 2004.

³ Wimanda, Rizki E., *Regional Inflation in Indonesia: Characteristic, Convergence, and Determinants*. Bank Indonesia Working Paper, No.13, 2006.

⁴ Carlino, Gerald dan Robert Defina, *The Differential Regional Effects of Monetary Policy*. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 80, No.4, November 1998. pp. 572-587, 1998.

⁵ Yanuarti, Tri, *Has Inflation Persistence in Indonesia Changed?*. *Working Paper Bank Indonesia*, 2007.

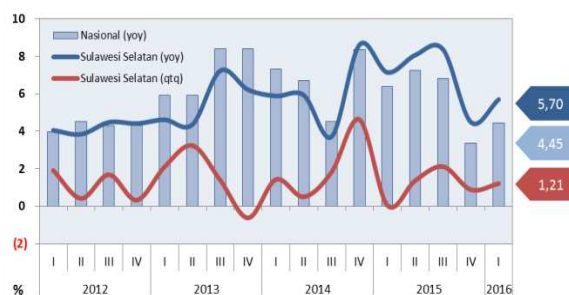
⁶ Alamsyah, Halim, *Persistensi Inflasi dan Dampaknya Terhadap Pilihan dan Respons Kebijakan Moneter*, *Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2008.

⁷ Harmanta, *Kredibilitas Kebijakan Moneter dan Dampaknya terhadap Persistensi Inflasi dan Strategi Disinflasi di Indonesia: dengan Model Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, 2009.

⁸ Arimurti, Trinil dan Trisnanto, Budi, *Persistensi Inflasi di Jakarta dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2011.

persistensi inflasi di Jakarta masih tinggi dengan kelompok komoditi penyumbang persistensi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga kelompok kesehatan. Penelitian Arimurti menyebutkan bahwa tingginya persistensi inflasi di Jakarta disebabkan oleh adanya penetapan harga oleh pemerintah (*administered price*) dan *shock* pada *volatile food*. Begitu juga, Hidayat (2013) menemukan bahwa derajat persistensi inflasi di Jawa Timur relatif tinggi.⁹ Sumber utama penyebab munculnya persistensi inflasi terkait *shock* yang terjadi pada komponen *administered price* yang diwakili oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan juga pada kelompok *volatile foods* yang diwakili oleh kelompok bahan makanan. Penelitian Hidayat juga menemukan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke nilai alaminya selama 8 hingga 16 bulan. Sedangkan untuk adanya pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan pengaruh yang baik bagi persistensi inflasi Jawa Timur. Setelah dibentuknya TPID, persistensi inflasi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan.

Kajian persistensi inflasi regional ini akan difokuskan pada Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada alasan bahwa provinsi ini merupakan salah satu representasi utama perekonomian Indonesia bagian timur dan mencatat tingkat inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang relatif dinamis di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya di kawasan tersebut, bahkan untuk seluruh komoditas atau kelompok barang/jasa pembentuk IHK.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan

Inflasi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir tercatat rata-rata sebesar 5,54% (y.o.y), dengan tingkat inflasi terendah sebesar 2,87% (y.o.y) dan tertinggi sebesar 8,61% (y.o.y). Tingkat inflasi

terendah di Sulawesi Selatan selama periode pengamatan terjadi pada akhir tahun 2011 yang salah satunya didorong oleh melemahnya laju inflasi pada sub-kelompok bahan bakar-penerangan-air dan sub-kelompok penyelenggaraan rumah tangga. Penurunan laju inflasi pada sub-kelompok ini disebabkan oleh hilangnya pengaruh kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada Juli 2010 (Bank Indonesia, 2010). Sementara inflasi tertinggi terjadi pada akhir tahun 2014 yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter atau 30,77% untuk premium dan 36,36% untuk solar yang diikuti kenaikan tarif angkutan dan bahan makanan (Bank Indonesia, 2014)¹⁰.

Dari Grafik 1 di atas terlihat bahwa pergerakan inflasi di Sulawesi Selatan relatif searah searah dengan pergerakan inflasi nasional, namun pergerakan yang cenderung naik di akhir-akhir periode pengamatan dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Dari grafik 1 juga dapat dilihat bahwa terdapat dugaan bahwa inflasi di Sulawesi Selatan memiliki derajat persistensi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih tingginya tingkat ketergantungan Sulawesi Selatan terhadap ketersediaan pasokan komoditas *volatile food* dan kebijakan pemerintah dalam bentuk *administered prices* yang masih menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan inflasi. Namun demikian, perlu penelaahan lebih lanjut untuk membuktikan dugaan tingginya derajat persistensi inflasi tersebut di Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian persistensi inflasi perlu pula didukung dengan analisis mengenai penyebab persistensi inflasi. Sebagaimana dimaklumi bahwa inflasi IHK dibentuk dari harga sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa, dimana harga komoditas-komoditas tersebut ada yang cenderung *flat* dan berubah dengan kebijakan Pemerintah atau *supply shocks* yang bersifat musiman. Untuk itu, diperlukan asesmen untuk melihat secara lebih rinci faktor-faktor yang bersifat fundamental, khususnya terkait dengan sejumlah komoditas tersebut. Hal ini dimaksudkan agar respon kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat.

Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan (*shock*) tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup

⁹ Hidayat, Fatimah, *Analisis Persistensi Inflasi Jawa Timur: Suatu Pendekatan Sisi Penawaran*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

¹⁰ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2014*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, 2014.

rentan terhadap kejutan-kejutan (*shocks*) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut. Dalam usaha untuk mengatasi inflasi yang bersumber dari kejutan pada sisi penawaran di bentuklah Tim Pengendali Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2008 dibentuk pula Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas untuk membantu pencapaian tingkat inflasi di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan yang mengemuka: (i) bagaimana tingkat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan?; (ii) bagaimana pengaruh dan kontribusi persistensi inflasi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi di Sulawesi Selatan?; (iii) bagaimana peranan TPID menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan?

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Inflasi

Terdapat berbagai macam definisi atau pengertian mengenai inflasi. Namun pada dasarnya semua pengertian mengenai inflasi mengacu pada kecenderungan harga barang-barang untuk naik secara umum dan terus-menerus.

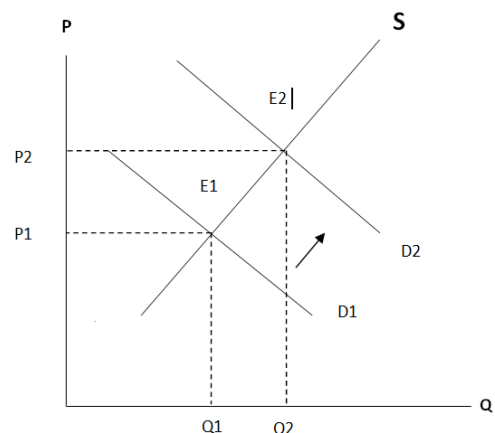
Samuelson dan Nordhaus (2004) mendefinisikan inflasi dengan cukup sederhana yaitu kenaikan tingkat harga umum.¹¹ Bank Indonesia (2016) mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.¹² Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Ackley dalam Iswardono (1997) mendefinisikan inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).¹³ Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Menurut Manurung dalam Subekan dan Azwar (2016), ada

tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu¹⁴:

- Kenaikan harga, dimana harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya;
- Bersifat umum, dimana kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik;
- Berlangsung terus-menerus, dimana kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulanan dan tahunan.

Secara ekonomi, perubahan harga dapat disebabkan oleh jumlah penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Inflasi dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) terjadi karena kenaikan permintaan total (*agregat demand*) yang berlebihan sementara produksi (*supply*) telah berada pada keadaan kesempatan kerja yang penuh dan tidak mungkin meningkat lagi sehingga penambahan permintaan hanya akan menyebabkan terjadinya perubahan peningkatan harga, seperti yang terlihat dalam kurva sebagai berikut:



Gambar 1. Kurva Demand Pull Inflation

dimana:

P1 : Harga harga awal

¹¹ Samuelson, PA, dan Nordhaus Wd, *Ilmu Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas, Diterjemahkan oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly*, PT. Media Global Edukasi, Jakarta, 2004.

¹² Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I 2016*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, 2016.

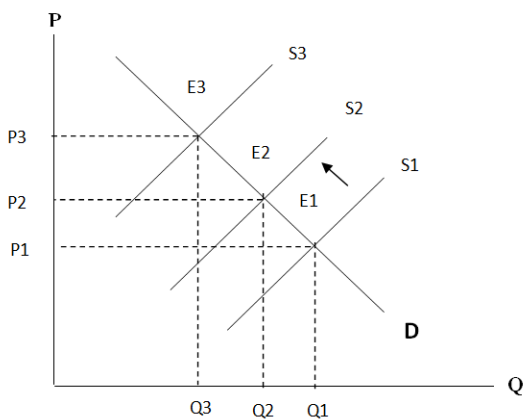
¹³ Iswardono, *Kebijakan Moneter di Indonesia (Indonesian Monetary Policy)*, Journal of Economics, FE UII, No. 2, Vol. 3, 1997, 1997.

¹⁴ Subekan, Achmat, Azwar, *Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Regional Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Pembuktian Flypaper Effect di Era Desentralisasi Fiskal di Sulawesi Selatan*. Kajian Akademis BPPK Kementerian Keuangan Tahun 2016, 2016.

P2 : Harga setelah ada perubahan
Q1 : Jumlah produksi awal
Q2 : Jumlah produksi setelah ada perubahan
E1 : Keseimbangan awal
E2 : Keseimbangan setelah ada perubahan

Perubahan Q1 ke Q2 menyebabkan harga ikut naik dari P1 ke P2 dan tingkat keseimbangan naik dari E1 ke E2. Ini terjadi akibat perubahan permintaan terhadap barang dan jasa, sedangkan faktor-faktor produksi tetap, akibatnya harga barang dan jasa meningkat, produksi barang dan jasa juga meningkat, dan titik keseimbangan berubah dari E1 ke E2 (Gambar 1).

Inflasi karena desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang sehingga terjadi pergeseran kurva penawaran ke kiri, seperti di jelaskan pada Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Kurva *Cost Push Inflation* dimana:

P1 : Harga harga awal
P2 : Harga setelah ada perubahan
P3 : Harga setelah ada perubahan
Q1 : Jumlah produksi awal
Q2 : Jumlah peoduksi setelah ada perubahan
Q3 : Jumlah produksi setelah ada perubahan
E1 : Keseimbangan awal
E2 : Keseimbangan setelah ada perubahan
E3 : Keseimbangan setelah ada perubahan

Perubahan titik keseimbangan dari E1 ke E2 kemudian E3 ini akibat besarnya biaya produksi dan produsen menurunkan jumlah produksi dari titik Q1 ke Q2 dan ke Q3, perubahan jumlah produksi itu menyebabkan harga naik sebesar P1, P2 dan P3 (Gambar 2).

Jika terjadi kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu secara kontinyu disebut inflasi tertutup (*closed inflation*) dan apabila kenaikan harga terjadi secara keseluruhan disebut inflasi terbuka (*open inflation*). Sedangkan jika serangan inflasi demikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (*hiperinflasi*).

2.2. Teori dan Pengukuran Persistensi Inflasi

Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa ketika terjadi guncangan dalam perekonomian, variabel ekonomi akan cenderung menjauh dari nilai alamiahnya untuk waktu yang lama, atau dengan kata lain variabel tersebut tidak langsung kembali kepada nilai alamiahnya jika mengalami guncangan. Fenomena seperti ini dikenal sebagai persistensi dari suatu variabel.

Menurut Angeloni dalam Alamsyah (2008) persistensi inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan lambatnya pergerakan inflasi menuju nilai jangka panjangnya ketika terjadi guncangan dalam perekonomian.¹⁵ Marques (2004) mendefinisikan persistensi inflasi sebagai kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ketingkat ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu *shock*.¹⁶ Definisi yang hampir serupa juga dikemukakan Willis dalam Arimurti (2011) yang mengartikan persistensi inflasi sebagai waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk kembali ke baseline setelah adanya *shock*. Persistensi inflasi adalah pengaruh jangka panjang dari guncangan terhadap inflasi.¹⁷ Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persistensi inflasi merupakan cepat atau lambatnya inflasi untuk kembali ke nilai alamiahnya ketika terjadi guncangan (*shock*) yang menyebabkan inflasi menjauh dari nilai alamiahnya tersebut.

Derajat persistensi yang tinggi menunjukkan lambatnya tingkat inflasi ke tingkat alamiahnya.

¹⁵ Alamsyah, Halim, *Persistensi Inflasi dan Dampaknya Terhadap Pilihan dan Respons Kebijakan Moneter*, Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

¹⁶ Marques, Carlos Robalo, *Inflation Persistence: Facts Or Artefacts?*, *Working Paper Series* no. 371, 2004.

¹⁷ Arimurti, Trinil dan Trisnanto, Budi, *Persistensi Inflasi di Jakarta dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2011.

Sebaliknya derajat persistensi yang rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat alamiahnya. *Shock* dimaksud antara lain dapat berupa kebijakan pemerintah, gangguan distribusi, bencana alam dan perubahan cuaca. Studi mengenai persistensi inflasi penting untuk meningkatkan kemampuan peramalan inflasi, memperoleh kejelasan efek dinamis dari *exogenous price shocks*, memberikan informasi/petunjuk dan memperbaiki kebijakan moneter, dan untuk menilai apakah rezim kebijakan moneter yang berbeda akan menghasilkan persistensi yang berbeda (Arimurti, 2011).¹⁸

Menurut Marques (2004), dalam mengukur persistensi inflasi, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan.¹⁹ Pertama, dalam estimasi persistensi inflasi, sangat tergantung dari nilai inflasi jangka panjang yang diasumsikan. Untuk mengetahui apakah inflasi bergerak dengan lambat atau cepat sebagai responnya terhadap guncangan, diperlukan informasi mengenai jalur inflasi yang akan diikuti, seandainya guncangan tidak terjadi dan seberapa besar tingkat inflasi yang diharapkan setelah pengaruh guncangan hilang. Kedua, apakah nilai jangka panjang dari inflasi harus diasumsikan *exogenous* (ditentukan oleh kebijakan moneter) ataukah *endogenous* (ditentukan oleh data). Dalam pendekatan multivariate dengan menggunakan model structural, dapat diketahui besarnya kemungkinan guncangan tertentu berpengaruh terhadap nilai inflasi jangka panjang, akan tetapi dalam pendekatan univariat harus diasumsikan bahwa guncangan tidak mempengaruhi nilai inflasi jangka panjang atau target inflasi bank sentral. Ketiga, target inflasi yang bergerak dapat menjadi sumber persistensi inflasi. Sebagai contoh, jika bank sentral merubah target inflasinya, orang-orang akan memerlukan waktu untuk belajar mengenai target yang baru, sehingga inflasi akan bergerak lebih lambat menuju nilai targetnya. Dalam studi empiris, hal ini dapat diketahui dengan penggunaan model structural.

Untuk mengukur tingkat persistensi inflasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan univariat dan multivariat model (Yanuarti, 2007).²⁰ Pendekatan univariat lebih menekankan hanya pada aspek data *time series*. Dalam pendekatan ini model autoregresif sederhana diasumsikan dan *shock* diukur dari

komponen *white noise* dari proses autoregresif. Sedangkan menurut Dossche dan Everaert (dalam Arimurti, 2011), pada pendekatan multivariat mencakup juga tambahan informasi seperti output riil dan tingkat suku bunga bank sentral. Pendekatan multivariate mengasumsikan hubungan kausalitas antara inflasi dan determinannya, dengan menggunakan *Phillips Curve* atau *Structural VAR* model. Persistensi inflasi dalam konteks ini adalah durasi dari suatu guncangan terhadap inflasi.

Marques (2004) menggarisbawahi perbedaan penting dari metode multivariat dan univariat.²¹ Pada pendekatan multivariate, kita dapat menganalisis *shock* berbeda yang turut mempengaruhi inflasi dan menentukan *shock* apa yang memiliki dampak spesifik pada persistensi inflasi. Sedangkan pada pendekatan univariat, *shock* pada inflasi tidak memiliki interpretasi ekonomi karena *shock* tersebut merupakan ukuran total *shock* yang mempengaruhi inflasi pada periode tersebut.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan, pendekatan univariat dengan menggunakan model *autoregressive (AR) time series* merupakan yang pendekatan yang paling lazim dalam riset empiris. Estimasi persistensi inflasi dilakukan dengan melihat proses *univariate autoregressive (AR) time series model* sebagaimana disebutkan oleh Marques (2004) karena model AR tersebut merupakan pengukur persistensi inflasi yang cukup baik serta berkaitan langsung dengan koefisien *mean reversion* sebagai alternatif pengukuran tingkat persistensi inflasi.²² Formula AR dengan order *p* dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\pi_t = \mu + \sum_{j=1}^k \alpha_j \pi_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

dimana:

- π_t : tingkat inflasi triwulanan pada waktu *t*
- μ : konstanta dari hasil proses estimasi, sebagai kontrol terhadap rata-rata inflasi
- $\sum_{j=1}^k \alpha_j$: jumlah koefisien AR

¹⁸ Arimurti, Trinil dan Trisnanto, Budi, *Persistensi Inflasi di Jakarta dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2011.

¹⁹ Marques, Carlos Robalo, *Inflation Persistence: Facts Or Artefacts?*, *Working Paper Series* no. 371, 2004.

²⁰ Yanuarti, Tri, *Has Inflation Persistence in Indonesia Changed?*. *Working Paper Bank Indonesia*, 2007.

²¹ Marques, Carlos Robalo, *Inflation Persistence: Facts Or Artefacts?*, *Working Paper Series* no. 371, 2004.

²² Marques, Carlos Robalo, *Inflation Persistence: Facts Or Artefacts?*, *Working Paper Series* no. 371, 2004.

ε_t : random error term atau residual dari regresi persamaan di atas

Tingkat persistensi inflasi dihitung dengan menjumlahkan koefisien AR ($\rho = \sum_{j=1}^k \alpha_j$). Persistensi inflasi dikatakan tinggi apabila tingkat inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai lag-nya, sehingga koefisiennya mendekati 1. Dalam hal ini, inflasi dikatakan mendekati *unit root process*. Untuk estimasi ρ , penentuan jumlah lag variable dependen yang sesuai menggunakan *Akaike Information Criterion* (AIC) dan atau *Schwarz Bayesian Information Criterion* (SBIC).

Sementara untuk mengukur berapa lama waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap 50% *shock* yang terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya, dapat digunakan formula (Gujarati, 2004)²³:

$$h = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (2)$$

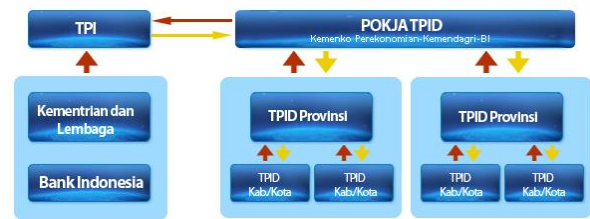
dimana h merupakan waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap 50% *shock* yang terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya dan ρ adalah hasil estimasi derajat persistensi inflasi.

2.3. Pengendalian Inflasi di Daerah

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi *supply* (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi, maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang

rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di level daerah pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri (Bank Indonesia, 2015).²⁴



Gambar 3. Keterkaitan Antara TPI, Pokjanas TPID dan TPID

Sumber: Bank Indonesia (2016)

Inisiatif pembentukan TPID dimulai sejak 2008 dengan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah. Saat ini telah terbentuk 93 TPID di 33 provinsi yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Keberadaan TPID juga menekankan pentingnya kerangka kerja sama yang lebih bersinergi antardaerah sejalan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Besarnya komitmen daerah untuk turut berpartisipasi menjaga stabilitas harga tertuang dalam Agenda Jakarta 2011 yang merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II TPID yang diselenggarakan pada 16 April 2011. Pada Rakornas II TPID juga disepakati pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor MOU-01/M.EKON/03/2011, 13/I/GBI/DKM/NK, 300-194 Tahun 2011. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, pada penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Jakarta-Jabar-Banten tanggal 14 Juli 2011 ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ketiga pihak tersebut yang

²³ Gujarati, Damodar, *Basic Econometrics, Fourth Edition*, New York: The McGraw-Hill Companies, 2004.

²⁴ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2015*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, 2015.

menandai terbentuknya Pokjanas TPID (Bank Indonesia, 2016).²⁵

Pokjanas TPID berperan dalam mengoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga.

2.4. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi pernah dilakukan untuk melihat persistensi inflasi di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun regional.

Studi yang dilakukan Yanuarti (2007) bertujuan untuk mengukur derajat persistensi inflasi di Indonesia serta meneliti apakah terjadi perubahan derajat persistensi inflasi pada kurun waktu 1990-2006.²⁶ Dengan menggunakan *full sample*, ditemukan bahwa derajat persistensi inflasi di Indonesia sangat tinggi, namun cenderung menurun pada periode setelah krisis.

Selanjutnya, Alamsyah (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat perubahan perilaku inflasi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah krisis, serta melihat sumber penyebab persistensi inflasi, terutama yang berasal dari perilaku mikro pengusaha yang didekati dengan model hybrid NKPC.²⁷ Dengan menggunakan pendekatan *univariate*, yaitu *the sum of autoregressive coefficient* (AR (1)) ditemukan bahwa derajat persistensi di Indonesia relatif tinggi pada periode pengamatan 1985-2007. Namun demikian, derajat persistensi tersebut cenderung

menurun pada masa setelah krisis ekonomi. Ditemukan pula bahwa inflasi di Indonesia berperilaku campuran yang merupakan kombinasi dari perilaku *backward* dan *forward looking*. Oleh karena itu, upaya penjangkaran ekspektasi inflasi menuju ke target yang ditetapkan bank sentral diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter di Indonesia.

Sementara itu, Harmanta (2009) menyatakan bahwa persistensi inflasi yang bersifat *backward looking* pada era ITF mengalami penurunan, sementara yang bersifat *forward looking* mengalami peningkatan.²⁸ Namun demikian, kajian tersebut perlu didukung oleh kajian yang bersifat regional, dalam arti melihat lebih dalam persistensi inflasi di tingkat regional. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa inflasi nasional dibentuk dari inflasi daerah. Secara lebih spesifik, kajian persistensi inflasi di daerah dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik inflasi yang berimplikasi pada kebijakan pengendalian inflasi yang spesifik meski secara umum tekanan inflasi di daerah banyak terkait dengan kejutan di sisi pasokan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kendari (2010) menunjukkan derajat persistensi inflasi yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota Kendari.²⁹ Kendari memiliki derajat persistensi sebesar 0,82 dan komoditi yang menyumbang bobot inflasi terbesar yaitu rokok kretek. Dari hasil Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV (2010) di Kalimantan Tengah, diwakili oleh Palangkaraya dan Sampit juga menunjukkan adanya persistensi inflasi yang relatif rendah-tinggi antara 0,4 - 0,9. Di Palangkaraya komoditas penyumbang inflasinya adalah beras, tarif listrik, minyak tanah, sewa rumah dan tarif telpon, sedangkan di Sampit yaitu beras, minyak goreng, rokok filter, tukang bukan mandor dan emas perhiasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arimurti (2011) pada persistensi inflasi di Jakarta menyebutkan bahwa tingkat persistensi inflasi di

²⁵ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I 2016*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, 2016.

²⁶ Yanuarti, Tri, *Has Inflation Persistence in Indonesia Changed? Working Paper Bank Indonesia*, 2007.

²⁷ Alamsyah, Halim, *Persistensi Inflasi dan Dampaknya Terhadap Pilihan dan Respons Kebijakan Moneter*, Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

²⁸ Harmanta, *Kredibilitas Kebijakan Moneter dan Dampaknya terhadap Persistensi Inflasi dan Strategi Disinflasi di Indonesia: dengan Model Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, 2009.

²⁹ Bank Indonesia Kendari, *Penelitian Persistensi Inflasi Sulawesi Tenggara*, 2010.

Jakarta masih tinggi dengan kelompok komoditi penyumbang persistensi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga kelompok kesehatan.³⁰ Dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyerap *shock* yang ada untuk kelompok komoditi selama 5-12 bulan, sedangkan untuk komoditi selama 3-12 bulan. Penelitian ini menyebutkan bahwa tingginya persistensi inflasi di Jakarta disebabkan oleh adanya penetapan harga oleh pemerintah (*administered price*) dan *shock* pada *volatile food*.

Di wilayah lainnya, Hidayat (2013) melakukan penelitian persistensi inflasi di Jawa Timur dengan teknik *model autoregressive (AR) time series* menemukan bahwa derajat persistensi inflasi di Jawa Timur tinggi yaitu sebesar 0,90.³¹ Penelitian Hidayati menyebutkan bahwa sumber utama penyebab munculnya persistensi inflasi terkait *shock* yang terjadi pada komponen *administered price* yang diwakili oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan juga pada kelompok *volatile foods* yang diwakili oleh kelompok bahan makanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke nilai alamiahnya selama 8 hingga 16 bulan. Sedangkan untuk adanya pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan pengaruh yang baik bagi persistensi inflasi Jawa Timur. Setelah dibentuknya TPID, persistensi inflasi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Implikasi dari temuan di atas yaitu dapat menjadi acuan dalam menentukan timing dalam menentukan kebijakan oleh pemerintah.

2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan empiris pada penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat ahwa kecenderungan persistensi inflasi di tingkat regional seperti di Palangkaraya, Sampit, Kendari (Bank Indonesia, 2010), Jakarta (Arimurti, 2011) dan Jawa Timur (Hidayat, 2013) relatif tinggi, maka dalam penelitian ini penulis menduga bahwa persistensi inflasi di Sulawesi Selatan juga tinggi.
2. Tingginya tingkat ketergantungan inflasi baik nasional maupun regional terhadap ketersediaan pasokan komoditas *volatile food* dan kebijakan pemerintah dalam bentuk *administered prices*, maka dalam penelitian ini penulis menduga bahwa sumber

utama (dominan) persistensi inflasi di Sulawesi Selatan berasal dari inflasi komoditas atau kelompok barang/jasa yang termasuk dalam komoditas *volatile food* dan *administered prices*.

3. Upaya untuk mengendalikan inflasi secara umum di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, telah didukung oleh koordinasi institusional antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat/daerah. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dibentuk sebagai tim antarinstansi dengan tugas utama memantau inflasi regional secara melekat dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi regional di daerah. Dengan keterangan ini, maka dalam penelitian ini penulis menduga bahwa keberadaan TPID Sulawesi Selatan dapat memberikan peranan yang baik terhadap pengendalian laju inflasi di Sulawesi Selatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data dan Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Data Inflasi Sulawesi Selatan berbentuk *time series* triwulanan periode tahun 2006.I s.d. 2016.I dan Data IHK dari tujuh kelompok komoditas barang/jasa pembentuk inflasi yaitu kelompok bahan makanan (BAMA); kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (MAJADI); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (PERUM); kelompok sandang (SAND); kelompok kesehatan (KES); kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (PENDIDI); kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (TRANS). Seluruh Data Inflasi dan IHK diperoleh dari Publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

Variabel-variabel yang digunakan yaitu:

1. Inflasi (INF)
Tingkat inflasi yang digunakan adalah inflasi IHK. Indeks Harga Konsumen (IHK) digunakan karena IHK mengukur kenaikan biaya hidup (*cost of living*) yang mencakup barang dan jasa yang banyak dikonsumsi masyarakat.
2. Kelompok Komoditi Penyusun IHK
Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2002 dan 2007 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungan inflasi dibentuk dari sejumlah komoditas atau

³⁰ Arimurti, Trinil dan Trisnanto, Budi, *Persistensi Inflasi di Jakarta dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2011.

³¹ Hidayat, Fatimah, *Analisis Persistensi Inflasi Jawa Timur: Suatu Pendekatan Sisi Penawaran*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

kelompok barang/jasa yang dikelompokkan secara umum menjadi beberapa kelompok yaitu :

- a. kelompok bahan makanan (BAMA) ;
- b. kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (MAJADI);
- c. kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (PERUM);
- d. kelompok sandang (SAND);
- e. kelompok kesehatan (KES);
- f. kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (PENDIDI);
- g. kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (TRANS).

3. Dummy TPID

Dummy TPID merupakan *proxy* yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

3.2. Metode Analisis

Estimasi persistensi inflasi dilakukan dengan metode analisis *univariate autoregressive (AR) time series model*. Pemilihan model AR tersebut dikarenakan model AR merupakan pengukur persistensi inflasi yang cukup baik. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, seperti yang dilakukan sebagaimana Marques (2004), Yanuarti (2007), Arimurti (2008), Alamsyah (2008) dan Hidayati (2013), model *univariate autoregressive (AR) time series* merupakan pendekatan yang paling lazim dalam riset empiris. Formula AR dengan order p dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\pi_t = \mu + \sum_{j=1}^k \alpha_j \pi_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3)$$

dimana :

- π_t : tingkat inflasi triwulanan pada waktu t
- μ : konstanta dari hasil proses estimasi, sebagai kontrol terhadap rata-rata inflasi
- $\sum_{j=1}^k \alpha_j$: jumlah koefisien AR
- ε_t : random error term atau residual dari regresi persamaan di atas

Tingkat persistensi inflasi dihitung dengan menjumlahkan koefisien AR:

$$(\rho = \sum_{j=1}^k \alpha_j)$$

Persistensi inflasi dikatakan tinggi apabila tingkat inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai lag-nya, sehingga koefisiennya mendekati 1.

Langkah awal analisis data penelitian yaitu dengan melakukan uji stasioneritas (uji akar unit). Dalam hal ini, inflasi dikatakan mendekati *unit root process*. Uji ini untuk membuktikan stabilitas (normalitas) pola masing-masing variabel, agar regresi yang dihasilkan tidak lancung (palsu) sehingga tidak menghasilkan interpretasi yang keliru. Penelitian ini menggunakan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) test* dengan kriteria pengujian jika nilai absolut statistik *ADF test* lebih besar dari nilai kritis distribusi statistik MacKinnon (*test critical values*), dalam hal ini nilai *Prob.* lebih kecil dari *alpha* atau 0.05, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa data *time series* yang diamati telah stationer. Dan sebaliknya, jika nilai absolut statistik *ADF test* lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik MacKinnon (*test critical values*), dalam hal ini nilai *Prob.* lebih besar dari *alpha* atau 0.05, maka H_0 diterima, yang berarti data *time series* tidak stationer.

Untuk estimasi ρ , peneliti juga melakukan uji penentuan panjang lag optimal. Uji ini digunakan untuk mengetahui lamanya periode suatu variabel dipengaruhi oleh variabel masa lalunya. Penentuan jumlah lag *variable dependen* yang optimal menggunakan beberapa parameter lain *Likelihood Ratio (LR)*, *Final Prediction Error (FPE)*, *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SC)* dan *Hannan Quinn (HQ)*. Penentuan panjang lag yang optimal ditandai dengan nilai AIC, SC atau LR yang terkecil (Enders, 2004).

Sementara untuk mengukur berapa lama waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap 50% *shock* yang terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya, dapat digunakan formula:

$$h = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (4)$$

dimana h merupakan waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap 50% *shock* yang terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya dan ρ adalah hasil estimasi derajat persistensi inflasi.

Setelah mengetahui derajat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan, selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap sumber persistensi inflasi di Sulawesi Selatan terutama dari sisi penawaran. Untuk mengetahui sumber persistensi inflasi di Sulawesi Selatan, penelitian ini mengadaptasi model yang digunakan oleh Hidayati (2013) yaitu *Partial Adjustment Model (PAM)* dengan persamaan awal sebagai berikut :

$$Y_t = \gamma\beta_0 + \gamma\beta_0 X_t + (1-\gamma) Y_{t-1} + v_t; \text{ dimana} \quad (5)$$

$$v_t = \delta e_t$$

Model PAM tersebut juga termasuk model *Autoregressive*. Berdasar pada model awal tersebut maka persamaan umum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$INF_t = \beta_0 + \beta_1 BAMA_t + \beta_2 MAJADI_t + \beta_3 PERUM_t + \beta_4 SAND_t + \beta_5 KES_t + \beta_6 PENDI_t + \beta_7 TRANS_t + \beta_8 DTPID_t + v_t \quad (6)$$

dimana:

- INF_t : Tingkat inflasi
- $BAMA_t$: Indeks harga kelompok bahan makanan
- $MAJADI_t$: Indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
- $PERUM_t$: Indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
- $SAND_t$: Indeks harga kelompok sandang
- KES_t : Indeks harga kelompok kesehatan
- $PENDIDI_t$: Indeks harga kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga
- $TRANS_t$: Indeks harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan
- $DTPID_t$: *Dummy* TPID
- β_0 : Konstanta
- $\beta_0 - \beta_7$: Koefisien
- v_t : *Error terms*

Persamaan di atas menunjukkan sumber-sumber persistensi inflasi yang terjadi di Sulawesi Selatan dilihat berdasarkan kelompok komoditi penyusun IHK. Selain itu, persamaan ini juga mencoba melihat pengaruh dari adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam persistensi inflasi di Sulawesi Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Hasil analisis data dalam penelitian dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu: (i) hasil analisis statistik deskriptif; (ii) hasil pengujian statistik sebelum estimasi yang meliputi uji stasioneritas data dan panjang *lag* optimal dan (iii) estimasi model *univariate autoregressive* (AR).

4.2. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif (Tabel 1) pada seluruh variabel menunjukkan bahwa rata-rata tingkat inflasi umum di Sulawesi Selatan selama periode penelitian tercatat rata-rata sebesar 6,86%

(y.o.y), dengan tingkat inflasi terendah sebesar 2,7% (y.o.y) dan tertinggi sebesar 16,85% (y.o.y). Inflasi pada kelompok BAMA menunjukkan rata-rata inflasi yang paling tinggi dibandingkan kelompok komoditas barang/jasa lainnya, yaitu sebesar 10,79% (y.o.y) selama periode penelitian. Kemudian rata-rata tingkat inflasi tertinggi setelah kelompok BAMA berturut-turut diikuti oleh kelompok SAND dan kelompok MAJADI dengan nilai rata-rata inflasi sebesar 6,86% (y.o.y) dan 6,58% (y.o.y). Rata-rata tingkat inflasi terendah selama periode penelitian pada kelompok pendidikan. Yang menarik adalah bahwa meskipun kelompok BAMA memiliki rata-rata tertinggi selama periode, namun titik tertinggi (maksimal) inflasi justru pada kelompok pendidikan. Artinya, dalam waktu atau triwulan tertentu, inflasi di Sulawesi Selatan pernah mencapai titik tertinggi yaitu pada kelompok pendidikan. Hal menarik lainnya adalah bahwa deflasi juga terjadi pada kelompok bahan makanan, kesehatan dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang ditunjukkan oleh titik minimal (terendah) selama periode penelitian.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	INF	BAMA	MAJADI	PERUM	SAND	KES	PEND	TRANS
Mean	6.86	10.79	6.58	5.38	6.86	4.901	4.77	4.71
Median	6.21	11.27	5.48	4.14	6.95	4.531	3.41	1.75
Maximum	16.85	21.45	14.51	11.91	12.42	11.11	13.49	29.99
Minimum	2.70	0.230	3.28	2.45	2.16	1.99	1.33	-5.01
Std. Dev.	3.56	5.99	2.96	2.62	2.73	2.141	3.53	8.12

Sumber: Hasil pengolahan data

4.2.1. Hasil Uji Stasioneritas

Berdasarkan hasil uji akar unit (*unit root test*) dengan menggunakan metode ADF test diperoleh bahwa hanya tiga variabel (PERUM, KES, dan TRANS) yang stasioner atau memiliki *unit root* pada level dan lima variabel lainnya (INF, BAMA, MAJADI, SAND, dan PENDIDI) tidak stasioner pada level. Oleh karena itu harus dilakukan pengujian stasioneritas pada *first difference*. Pengujian pada *first differences* dengan menggunakan ADF test menunjukkan bahwa kelima variabel telah stasioner pada tingkat signifikansi 5% (Tabel 2).

Tabel 2
Hasil Uji Stasioner

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test						
	Level			First Difference		
	critical values	t-statistic	Prob.*	critical values	t-statistic	Prob.*
INF	-2.945	-2.213	0.205	-2.945	-5.194	0.000*
BAMA	-2.936	-2.740	0.076	-2.945	-5.436	0.000*
MAJADI	-2.941	-3.929	0.004*			
PERUM	-2.938	-4.400	0.001*			
SAND	-2.936	-2.440	0.137	-2.938	-7.370	0.000*
KES	-2.938	-3.931	0.004*			
PENDIDI	-2.938	-1.873	0.340	-2.938	-4.739	0.000*
TRANS	-2.936	-3.795	0.006*			

Sumber : Hasil pengolahan data ; *) data signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan hasil uji stasioner tersebut dapat dikatakan bahwa data telah memenuhi syarat stasioneritas. Oleh karena terdapat tiga variabel yang telah stasioner pada level dan lima variabel stasioner pada *difference* yang sama (*first difference*) atau dengan kata lain bahwa tidak semua variabel stasioner pada *difference*, maka model yang telah dispesifikasikan sebelumnya dapat diestimasi lebih lanjut.

4.2.2. Hasil Uji Panjang Lag Optimal

Penentuan lag dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Likelihood Ratio (LR)*, *Final Prediction Error (FPE)*, *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SC)* dan *Hannan Quinn (HQ)*. Hasil penentuan panjang lag secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Panjang Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-613.2	NA	9463.4	31.8	32.1	-613.2
1	-450.0	251.10*	62.4*	26.7	29.8*	-450.0
2	-383.5	75.0	84.6	26.6*	32.44314	-383.5

Sumber : Hasil pengolahan data ;

*) indicates lag order selected by the criterion.

Berdasarkan Tabel 3 lag optimal menurut kriteria LR, FPE, AIC, SC dan HQ yang nilainya terkecil dan paling banyak ditunjuk adalah lag 1 sebagaimana ditunjukkan dengan tanda (*). Oleh karena itu, dalam proses selanjutnya untuk mengestimasi model akan digunakan lag ke-1.

4.2.3. Pengujian Persistensi Inflasi

Pengujian persistensi inflasi Sulawesi Selatan dengan menggunakan model *autoregressive* menghasilkan output sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Pengujian Persistensi Inflasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.458	0.847	1.721	0.093
INF(1)	0.816	0.114	7.158	0.000
<i>R-squared</i>				0.57
<i>Adjusted R-squared</i>				0.56

Sumber: Hasil pengolahan data

Derajat persistensi yang tinggi menunjukkan lambatnya tingkat inflasi ke tingkat alamiahnya. Sebaliknya derajat persistensi yang rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat alamiahnya. Tingkat persistensi inflasi dapat dilihat dari koefisien autoregresif. Persistensi inflasi dikatakan tinggi apabila tingkat inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai lag-nya, sehingga koefisiennya mendekati 1. Berdasarkan hasil uji autoregresif (AR) menggunakan program *Eviews* sebagaimana Tabel 4 di atas, diketahui bahwa koefisien autoregresif (AR (1)) sebagai indikator persistensi inflasi di Sulawesi Selatan bernilai 0,82. Nilai tersebut menunjukkan mendekati angka 1 (satu), yang berarti bahwa tingkat persistensi inflasi Sulawesi Selatan tergolong tinggi.³² Koefisien persistensi yang tinggi menyatakan lambatnya tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat alamiahnya setelah timbul suatu *shock* sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi Sulawesi Selatan bersifat persisten. Persistensi inflasi Sulawesi Selatan yang tinggi ini berarti bahwa secara umum nilai inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai masa lalunya, sehingga pengaruh guncangan atau *shock* terhadap inflasi akan sulit dinetralisir yang mengakibatkan inflasi akan sulit untuk kembali ketingkat alamiahnya. Dengan hasil ini maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima.

Hasil ini menjadi bukti empiris yang menguatkan fakta bahwa persistensi inflasi daerah di Indonesia relatif tinggi. Penelitian Bank Indonesia di beberapa wilayah, seperti Kendari (2010) dan Kalimantan Tengah (2010), menyebutkan derajat persistensi inflasi yang tinggi, yaitu di Kendari sebesar 0,82 dan Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kota Palangkaraya dan Sampit sebesar 0,4–0,9. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Arimurti (2011) mengenai persistensi inflasi di Jakarta yang tergolong tinggi yaitu sebesar 0,94. Begitupula, Hidayati (2013) menemukan bahwa persistensi inflasi di Jawa Timur juga tergolong tinggi yaitu sebesar 0,90. Sehingga dapat dinyatakan bahwa persistensi

³² Kategori persistensi inflasi tinggi apabila tingkat persisten mencapai nilai > 0,80 (Arimurti, 2011).

inflasi yang tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia yaitu Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

4.2.4. Pengujian Sumber Persistensi Inflasi

Pengujian sumber persistensi inflasi Sulawesi Selatan difokuskan pada sisi penawaran. Sumber-sumber persistensi inflasi yang terjadi di Sulawesi Selatan dilihat berdasarkan sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa penyusun IHK yang terdiri dari komponen *volatile foods* dan *administered price*. Terdapat tujuh kelompok komoditi penyusun IHK yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelompok bahan makanan (BAMA) ; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (MAJADI); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (PERUM); kelompok sandang (SAND); kelompok kesehatan (KES); kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (PENDIDI); kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (TRANS).

Pengujian sumber persistensi inflasi di Sulawesi Selatan dengan *Partial Adjustment Model* (PAM) diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Pengujian Sumber Persistensi Inflasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BAMA	0.243	0.008	29.076	0.000
MAJADI	0.113	0.026	4.346	0.000
PERUM	0.237	0.048	4.885	0.000
SAND	0.123	0.019	6.340	0.000
KES	0.017	0.032	0.520	0.606
PENDIDI	0.090	0.013	6.976	0.000
TRANS	0.186	0.007	24.611	0.000
INF(1)	0.018	0.015	1.180	0.246
C	-0.153	0.120	-1.274	0.212
R-squared	0.997			
Adjusted R-squared	0.996			
F-statistic	1577.992			
Prob(F-statistic)	0.000			

Sumber: Hasil pengolahan data

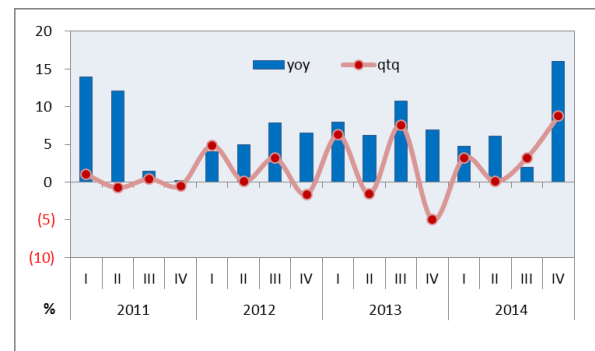
Dari hasil estimasi model untuk mengetahui sumber persistensi inflasi Sulawesi Selatan pada Tabel 5 di atas, variabel terbesar yang mempengaruhi persistensi inflasi di Sulawesi Selatan adalah kelompok bahan makanan dengan koefisien sebesar 0, 243342 dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar dengan koefisien sebesar 0, 237354. Kedua kelompok ini termasuk dalam komponen *administered price* dan *volatile foods*. Dengan hasil ini maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua penelitian ini diterima.

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dipilih untuk mewakili komponen *administered price* dikarenakan pada kelompok ini lebih didominasi oleh kebutuhan yang harganya

ditentukan oleh pemerintah, seperti tarif dasar listrik, bahan bakar dan air. Sedangkan kelompok bahan makanan merupakan komponen *volatile foods* karena pada kelompok ini terdiri dari bahan makanan seperti beras, daging, kacang-kacangan, buah-buahan dan lain sebagainya yang rentan terhadap guncangan seperti bencana alam dan gagal panen akibat bencana alam, kekeringan dan banjir maupun faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik dan perkembangan harga komoditas pangan internasional. Adanya guncangan seperti ini sering dialami oleh daerah-daerah di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Sulawesi Selatan.

Pada triwulan IV 2014 sebagai periode dimana inflasi Sulawesi Selatan mencapai titik tertinggi dalam periode penelitian, inflasi di kelompok bahan makanan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi terjadi dari 1,97% (yoy) pada triwulan III 2014 menjadi 16,02% (yoy) pada triwulan IV 2014 (Grafik 2). Peningkatan tingkat inflasi terutama didorong oleh penyesuaian harga yang dilakukan para pedagang terhadap kenaikan harga BBM. Selain itu, faktor musiman dimana beberapa sentra bumbu-bumbuan baru memasuki musim tanam baru juga menjadi salah satu penyebab peningkatan inflasi di kelompok bahan makanan. Keadaan stok yang terbatas ini, ditengarai dimanfaatkan untuk mencari untung dengan meningkatkan harga.

Grafik 2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan



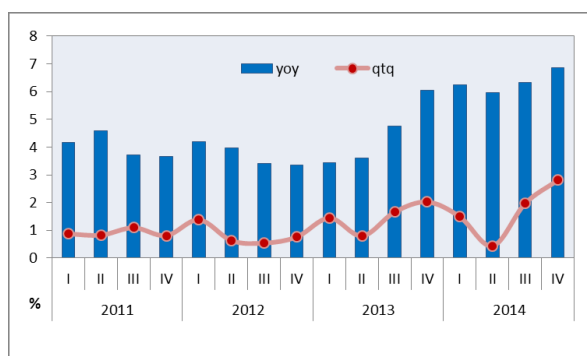
Sumber: Bank Indonesia

Faktor cuaca menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan tekanan inflasi. Intensitas hujan yang terus meningkat sepanjang akhir tahun 2014 mengakibatkan peningkatan gelombang laut yang berakibat pada terganggunya aktifitas melaut yang dilakukan oleh para nelayan. Intensitas hujan yang tinggi juga berpengaruh pada produktivitas ikan budidaya. Terganggunya pH air kolam budidaya mengakibatkan ikan yang di budidayakan tidak tumbuh secara optimal. Pengaruh cuaca terhadap inflasi komoditas perikanan terkonfirmasi dari inflasi beberapa komoditas hasil laut sepanjang triwulan IV 2014 seperti ikan bandeng (bolu), ikan

cakalang, ikan laying, ikan teri, ikan tongkol, dan udang basah. Selain itu, faktor cuaca juga berpengaruh negatif terhadap harga sayur-sayuran. Beberapa jenis tanaman hortikultura tidak tumbuh secara optimal ditingkat curah hujan yang tinggi sehingga terjadi peningkatan harga bayam, kacang panjang, kangkung, dan sawi hijau di triwulan IV 2014 (Bank Indonesia, 2014).

Memasuki triwulan I tahun 2015 (Grafik 1), meskipun inflasi secara umum turun, namun inflasi kelompok *volatile food* masih menghadapi persoalan tingginya harga beras. Komoditas beras tercatat mengalami inflasi 18,32% (yoy) dengan sumbangan inflasi 0,80% terhadap inflasi tahunan Sulsel, terbesar di antara seluruh komoditas yang masuk dalam sampel perhitungan inflasi di Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, beras mengalami peningkatan inflasi dari 8,46% (yoy) di 2014 menjadi 18,32% (yoy) di tahun 2015. Kondisi ini perlu diatasi dengan tepat agar harga beras lebih stabil, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kebijakan, karena Sulawesi Selatan merupakan daerah produsen beras. Secara umum, inflasi di kelompok ini masih berasal dari subkelompok makanan jadi, perumahan, dan sandang akibat tingginya permintaan di akhir tahun. Selain itu, masih tingginya biaya bahan baku impor juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi di kelompok inti, khususnya komoditas berbahan baku kedelai yang sebagian besar merupakan hasil impor.

Grafik 3. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Gas, dan Bahan Bakar



Sumber: Bank Indonesia

Adapun pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, laju inflasi di kelompok ini pada triwulan IV 2014, meningkat dibandingkan triwulan III 2014. Laju inflasi tercatat sebesar 6,87% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

(6,32%, yoy) (Grafik 3). Naiknya laju inflasi tahunan didorong terutama oleh subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air yang meningkat dari 9,24% (yoy) di triwulan III 2014 menjadi 16,18% (yoy) di periode pelaporan seiring dengan kenaikan harga BBM jenis Premium dan Solar pada bulan November 2014. Tiga subkelompok lainnya yaitu subkelompok biaya tempat tinggal, subkelompok perlengkapan rumah tangga dan subkelompok penyelenggaraan rumah tangga mengalami penurunan tekanan inflasi. Tercatat pada periode pelaporan ketiga subkelompok ini secara berturut-turut mengalami inflasi sebesar 3,71% (yoy), 5,12% (yoy), dan 6,56% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2014 yang secara berturut-turut ketiganya mengalami inflasi sebesar 4,48% (yoy), 6,95% (yoy), dan 7,00% (yoy). Peningkatan harga properti menjadi salah satu faktor penyebab inflasi tahunan subkelompok biaya tempat tinggal. Seperti yang telah disebutkan di atas, implementasi kebijakan oleh pemerintah yang menaikkan BBM jenis Premium dan Solar akhir November 2014 menjadi penyebab utama kenaikan tingkat inflasi. Kedua jenis bahan bakar ini naik sebesar Rp 2.000 per liter atau 30,77% untuk premium dan 36,36% untuk solar. Bila mengacu pada bobot per komoditas, kenaikan harga premium sebesar Rp 2.000 per liter memberikan andil inflasi sebesar 1,15% sedangkan kenaikan harga Solar memberikan andil inflasi sebesar 0,01%.

Temuan ini dikonfirmasi oleh publikasi Bank Indonesia (2016) bahwa berdasarkan disagregasi³³ inflasi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir, tingkat inflasi terutama bersumber dari peningkatan tekanan inflasi di kelompok *administered price* dan *volatile food* (Grafik 4). Kelompok *administered price* tercatat mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki triwulan II tahun 2013. Tekanan inflasi dari kelompok ini terus berada di atas rata-rata inflasi IHK hingga triwulan III tahun 2015. Peningkatan inflasi kelompok *administered price* didorong oleh peningkatan tarif angkutan udara. Komoditas lain yang tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi di kelompok *administered price* adalah Bahan Bakar Rumah Tangga, Angkutan Dalam Kota, dan Rokok Kretek Filter. Ketiga komoditas ini tercatat mengalami inflasi masing-masing 3,43% (yoy); 2,81% (yoy); dan 1,11% (yoy) dengan andil masing-masing 0,06% (yoy), 0,05% (yoy), dan 0,02% (yoy) terhadap total inflasi tahunan Sulsel. Sedangkan kelompok *volatile food* tercatat mengalami peningkatan tekanan inflasi yang tajam dan di atas rata-rata inflasi IHK pada triwulan IV tahun 2014. Sementara itu, kelompok inflasi inti (*core*) tercatat relatif stabil, dimana kelompok komoditas ini

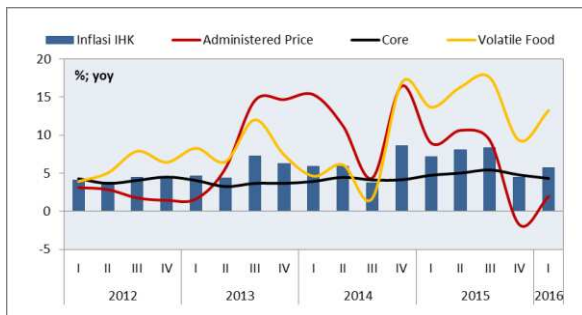
³³ Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (*core inflation*) dan inflasi noninti (*volatile food* dan *administered prices*). Hal ini

dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

mencatatkan inflasi yang cenderung tetap selama periode penelitian. Faktor musim mempengaruhi tingkat inflasi bahan pangan utama, khususnya beras. Mundurnya musim tanam komoditas pangan utama khususnya beras akibat kemarau panjang di akhir tahun berdampak pada mundurnya musim panen di awal tahun 2016.

Pada inflasi inti (*core*), tekanan inflasi relatif stabil (4,32%; yoy). Secara umum, inflasi di kelompok ini masih berasal dari subkelompok makanan jadi, perumahan, dan sandang akibat peningkatan permintaan. Selain itu, masih tingginya biaya bahan baku impor juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi di kelompok inti, khususnya komoditas berbahan baku kedelai yang sebagian besar merupakan hasil impor.

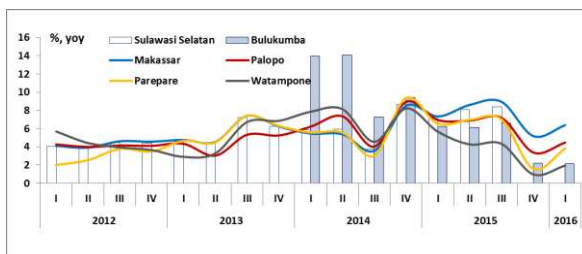
Grafik 4. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Disagregasi



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagai tambahan informasi, tingginya persistensi inflasi Sulawesi Sulawesi juga tidak lepas dari relatif tinggi dan dinamisnya tingkat inflasi di beberapa kota di Sulawesi Selatan. Sehingga secara spasial, peningkatan tekanan inflasi Sulawesi Sulawesi didorong oleh peningkatan inflasi di seluruh kota IHK di Sulawesi Selatan (Watampone, Makassar Palopo, Parepare, dan Bulukumba).

Grafik 5. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tekanan inflasi yang tinggi di daerah perkotaan (Makassar, Palopo, dan Parepare) mencerminkan karakteristik daerah perkotaan yang memiliki permintaan tinggi, namun produksi relatif rendah (*excess demand*), khususnya untuk

komoditas pangan. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan harus dipasok dari daerah lain, dengan jalur distribusi yang relatif panjang, sehingga ongkos untuk pendistribusian barang menjadi relatif mahal.

Secara umum, peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh penurunan pasokan bahan makanan khususnya beras. Di tiga kota IHK, yaitu Makassar, Parepare, dan Bulukumba, beras masuk dalam lima komoditas utama penyumbang inflasi di kota tersebut. Mundurnya musim tanam akibat kemarau panjang di akhir tahun berdampak pada mundurnya musim panen di awal tahun 2016. Panen padi diperkirakan baru akan berlangsung pada akhir Maret hingga awal April 2016 (Bank Indonesia, 2016).

4.2.5. Pengujian Persistensi Inflasi Komoditas atau Kelompok Barang/Jasa

Di samping pengukuran derajat persistensi inflasi Sulawesi Selatan secara umum, penelitian ini juga melakukan pengukuran tingkat persistensi inflasi IHK berdasarkan sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa pembentuknya. Hasil estimasi derajat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan pada masing-masing komoditas atau kelompok barang/jasa sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6
Derajat Persistensi Inflasi Komoditas atau Kelompok Barang/Jasa

No.	Komoditas/Kelompok	Derajat Persistensi
1	bahan makanan	0.70
2	makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	0.82
3	perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	0.78
4	sandang	0.72
5	kesehatan	0.79
6	pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.81
7	transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0.84

Sumber: Hasil pengolahan data

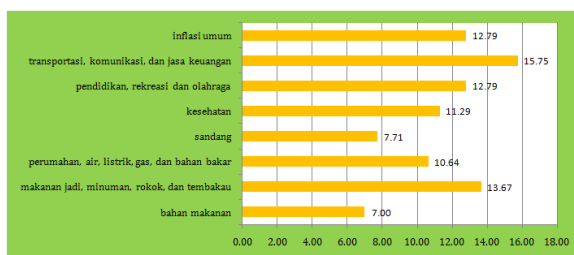
Derajat persistensi inflasi berdasarkan sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa pembentuknya pada Tabel 6 di atas diperoleh dengan menjumlahkan seluruh koefisien AR sesuai dengan lag optimum inflasi masing-masing komoditas atau kelompok barang/jasa. Hasil estimasi derajat persistensi inflasi secara umum menunjukkan bahwa inflasi IHK Sulawesi Selatan masih sangat persisten untuk seluruh komoditas atau kelompok barang/jasa. Hal ini sejalan dengan persistensi inflasi nasional yang juga menunjukkan angka persistensi yang tinggi. Dari 7 komoditas atau kelompok barang/jasa pembentuk IHK, seluruhnya

menunjukkan derajat persistensi inflasi yang relatif tinggi, berada pada kisaran nilai 0,70-0,84.

Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa derajat persistensi inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang karakteristiknya inflasinya banyak dipengaruhi oleh *shock* gangguan pasokan dan distribusi terlihat masih relatif tinggi. Sementara itu, kelompok komoditi yang persistensi inflasinya tertinggi adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Pada triwulan IV 2014 sebagai periode dimana inflasi Sulawesi Selatan mencapai titik tertinggi dalam periode penelitian, penyesuaian tarif angkutan umum dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2014 menindaklanjuti kenaikan BBM jenis Premium dan Solar yang terjadi di bulan sebelumnya. Tarif angkutan dalam dan luar kota yang mengalami kenaikan menjadikan inflasi pada kelompok ini tertahan atau persisten.

Selanjutnya, tingginya derajat persistensi inflasi Sulawesi Selatan tercermin pula dari lamanya waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Arimurti (2008), Alamsyah (2008) dan Hidayati (2013), diperoleh hasil perhitungan waktu dari masing-masing komoditas atau kelompok barang/jasa untuk kembali ke inflasi alamiahnya sebagaimana Grafik 4.

Grafik 5. Waktu yang Dibutuhkan Inflasi Kelompok Komoditi Kembali ke Nilai Rata-rata (Bulan)



Sumber: Bank Indonesia, 2015, diolah

Dengan besarnya persistensi inflasi Sulawesi Selatan yaitu 0,82, maka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu sekitar 13 bulan. Sedangkan untuk kelompok komoditi dengan derajat persistensi antara 0,70-0,84, memerlukan waktu selama 7 hingga 15,75 bulan. Kelompok komoditi dengan derajat persistensi inflasi tertinggi yaitu kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memerlukan waktu yang paling lama kurang lebih 16 bulan sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Sedangkan kelompok komoditi bahan makanan memerlukan waktu kurang lebih 7 bulan untuk kembali ke nilai alamiahnya (Grafik 5).

4.2.6. Peranan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terhadap Persistensi Inflasi Sulawesi Selatan

Untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di level daerah pada tahun 2008. Inisiatif pembentukan TPID dimulai sejak 2008 dengan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah. Saat ini telah terbentuk 93 TPID di 33 provinsi yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga (Bank Indonesia, 2015).

Pada tingkat regional Sulawesi Selatan, TPID telah dibentuk pada tahun 2009 melalui Surat Keputusan Nomor 3956/XII/2009 diperbaharui dengan SK No. 238/II/2014. Pada tingkat kabupaten/kota, dengan peresmian TPID Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Oktober 2014, maka saat ini TPID telah ada di 24 kabupaten/kota di seluruh Sulawesi Selatan (Lihat Lampiran 1). Dengan telah berdirinya TPID di seluruh kabupaten/kota maka diharapkan kedepannya koordinasi dan proses pengendalian inflasi dapat berjalan lebih baik (Bank Indonesia, 2014).

TPID dalam penelitian ini diprosikan dengan variabel kualitatif (*dummy*). TPID Sulawesi Selatan mulai dibentuk pada tahun 2009, maka periode *time series* sebelum dibentuknya TPID diwakili dengan nilai 0 dan periode setelahnya diwakili dengan nilai 1.

Hasil estimasi (pengujian) peranan *Dummy* TPID terhadap pembentukan inflasi di Sulawesi Selatan dengan *Ordinary Least Square* sebagaimana pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Hasil Estimasi Peranan *Dummy* TPID

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.001	1.144	2.622	0.012
TPID	-1.559	0.808	-1.929	0.061
<i>R-squared</i>	0.613			
<i>Adjusted R-squared</i>	0.592			
<i>F-statistic</i>	29.316			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000			

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 7 di atas, koefisien variabel *Dummy* TPID bernilai sebesar -1.559267. Hal ini dapat dipahami bahwa keberadaan TPID di Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan. Artinya, terdapat perbedaan pada persistensi inflasi sebelum dan setelah adanya TPID. Sebelum dibentuknya TPID yaitu sebelum tahun 2009, inflasi cenderung tinggi. Sedangkan setelah dibentuknya TPID, inflasi cenderung menurun (Grafik 6). Dengan hasil ini maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil kajian Subekan dan Azwar (2016) yang menganalisis peran TPID pada pembentukan harga di Sulawesi Selatan. Mereka menemukan bahwa keberadaan TPID di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan.

Grafik 6. Ilustrasi Inflasi Pra dan Pasca Terbentuknya TPID Sulawesi Selatan (2006.1-2016.1)



Sumber: Bank Indonesia

Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bank Indonesia, di antara upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan melalui peningkatan koordinasi antarTPID se-Sulawesi Selatan dalam *High Level Meeting* (HLM) dimana seluruh pemangku kebijakan hadir untuk membahas langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan untuk mengendalikan inflasi ke depan. Dengan upaya ini, diharapkan keberadaan TPID di

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dapat lebih efektif untuk mengawal inflasi agar tetap terkendali.

Mengingat bahwa penelitian ini menemukan bahwa tingginya derajat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan antara lain diakibatkan oleh tingginya derajat persistensi inflasi yang terjadi pada kelompok *volatile food* dan kelompok *administered price*, maka seluruh pemangku kebijakan di tingkat pemerintah daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan bersama TPID perlu untuk membentuk *desk* kerjasama untuk melakukan pemantauan harga, pasokan dan distribusi kelompok komoditas yang masuk dalam kelompok *volatile food* dan *administered price* serta melaporkannya secara mingguan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi di Sulawesi Selatan memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya *shock*. Tingginya derajat persistensi inflasi Sulawesi Selatan tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% *shock* yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi Sulawesi Selatan untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 13 bulan;
2. Persistensi inflasi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh *shock* yang terjadi pada komponen *administered price* dan *volatile foods*. Hal ini dapat dilihat dari kelompok komoditi yang memberikan kontribusi besar pada persistensi inflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok bahan makanan;
3. Keberadaan TPID di Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan. Artinya, terdapat perbedaan pada persistensi inflasi sebelum dan setelah adanya TPID. Sebelum dibentuknya TPID yaitu sebelum tahun 2009, inflasi cenderung tinggi. Sedangkan setelah dibentuknya TPID, inflasi cenderung menurun.

6. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Inflasi yang tinggi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi akan memberikan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan memengaruhi daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan tetap. Pengelolaan ekonomi akan menjadi lebih sulit bila tingkat inflasi yang terbentuk menjadi persisten. Sesuai dengan salah satu definisi mengenai persistensi inflasi, laju inflasi akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali kepada tingkat sebelum terjadi kejutan (*shock*). Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap besarnya upaya yang diperlukan untuk menurunkan tingkat inflasi. Persistensi inflasi yang tinggi di Sulawesi Selatan memberikan implikasi bahwa upaya penurunan inflasi nasional akan menjadi tantangan yang lebih besar mengingat Sulawesi Selatan memiliki bobot yang relatif besar dalam pembentukan inflasi nasional;
2. Berdasarkan hasil estimasi, tingginya derajat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan antara lain diakibatkan oleh tingginya derajat persistensi inflasi yang terjadi pada kelompok *volatile food* dan kelompok *administered price*. Inflasi *volatile food* dan *administered price* yang tinggi akan memengaruhi ekspektasi inflasi sehingga berpotensi mempersulit upaya pengendalian inflasi daerah. Hal ini berimplikasi bahwa koordinasi para pemangku kebijakan di bidang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan TPID, harus dioptimalkan lagi. Selain itu, pengendalian *administered price* sangat bergantung pada upaya Pemerintah Daerah untuk mengatur *timing* dan *magnitude* kebijakan di bidang harga (dan pendapatan) sehingga memberikan dampak yang minimal terhadap inflasi, misalnya dengan penetapan harga (*administered price*) secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi pada inflasi dan harga di kelompok komoditas lainnya;
3. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup hanya dengan melalui kebijakan moneter yang bersifat skala nasional. Permasalahan inflasi di daerah banyak yang sifatnya non-moneter atau butuh koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah terkait pengendaliannya. Oleh karena itu, selain mengandalkan kebijakan ekonomi secara nasional, diperlukan pula kebijakan dari pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah, sehingga peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah dibentuk menjadi teramat penting dan krusial

dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi terkait penanganan inflasi daerah;

4. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup hanya melakukan pengendalian secara parsial yang fokus pada kelompok komoditas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam pembentukan inflasi daerah, tetapi juga hendaknya melihat seluruh kelompok komoditas secara simultan. Hal ini karena sifat keterkaitan yang dimiliki antar harga kelompok komoditas pembentuk inflasi yang memiliki kontribusi pada peningkatan inflasi di kelompok komoditas lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil empiris penelitian ini bahwa komoditas selain yang termasuk dalam kelompok *volatile food* dan *administered price* juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap persistensi inflasi di Sulawesi Selatan;
5. Upaya pengendalian inflasi daerah terutama pada pengendalian harga kelompok bahan makanan memerlukan kebijakan yang sifatnya struktural, yaitu (terutama) dalam mendorong terjadinya perbaikan dalam pola distribusi pasokan serta dukungan infrastruktur yang memperlancar transportasi dan distribusi barang. Salah satunya dengan pembentukan perusahaan daerah sebagai badan penyangga pangan yang berperan dalam manajemen distribusi dan pasokan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim. (2008). *Persistensi Inflasi dan Dampaknya Terhadap Pilihan dan Respons Kebijakan Moneter*. *Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Arimurti, Trinil dan Trisnanto, Budi. (2011). *Persistensi Inflasi Di Jakarta dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Bank Indonesia. (2010). *Persistensi Inflasi Studi Di Kota Palangkaraya dan Sampit*. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV*.
- Bank Indonesia Kendari. 2010. *Penelitian Persistensi Inflasi Sulawesi Tenggara*.
- Bank Indonesia (2014). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2014*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan.
- Bank Indonesia (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2015*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan.
- Bank Indonesia (2016). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I 2016*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan.

- Carlino, Gerald dan Robert Defina. (1998). *The Differential Regional Effects of Monetary Policy*. The Review of Economics and Statistics, Vol. 80, No.4, November 1998. pp. 572-587.
- Enders, Walter, 2004, *Applied Econometric Time Series*. 2nd Edition, New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Gujarati, Damodar (2004). *Basic Econometrics, Fourth-Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Iswardono (1997). *Kebijakan Moneter di Indonesia (Indonesian Monetary Policy)*. Journal of Economics, FE UII, No. 2, Vol. 3, 1997.
- Harmanta. (2009). *Kredibilitas Kebijakan Moneter dan Dampaknya terhadap Persistensi Inflasi dan Strategi Disinflasi di Indonesia: dengan Model Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayat, Fatimah. (2013). *Analisis Persistensi Inflasi Jawa Timur: Suatu Pendekatan Sisi Penawaran*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Marques, Carlos Robalo. (2004). *Inflation Persistence: Facts Or Artefacts?. Working Paper Series no. 371*.
- Nopirin (1994). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPF.
- Samuelson, PA, dan Nordhaus WD (2004). *Ilmu Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas, Diterjemahkan oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly*. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Subekan, Achmat, Azwar. (2016). *Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Regional Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Pembuktian Flypaper Effect di Era Desentralisasi Fiskal di Sulawesi Selatan*. Kajian Akademis BPPK Kementerian Keuangan Tahun 2016.
- Wimanda, Rizki E. (2006). *Regional Inflation in Indonesia: Characteristic, Convergence, and Determinants*. Bank Indonesia Working Paper, No.13, Oktober 2006.
- Yanuarti, Tri. (2007). *Has Inflation Persistence in Indonesia Changed?. Working Paper Bank Indonesia*.

Lampiran I

Tabel Data TPID Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

NO	TPID	SURAT KEPUTUSAN		KET
		NOMOR	TANGGAL	
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3956 / XII / 2009 diperbaharui dengan SK No. 238 / II / 2014	09-Des-09	-
			03-Feb-14	
2	Kota Palopo	457 / III / 2011	01-Mar-11	Sampel IHK
3	Kabupaten Bone	228 / 2011	06-Jul-11	Sampel IHK
4	Kota Pare-Pare	18 / 2012	17-Jan-12	Sampel IHK
5	Kota Makassar	510.05 / 356 / KEP / II / 2012	14-Feb-12	Sampel IHK
6	Kabupaten Pangkep	374 / VII / 2013	01-Jul-13	-
7	Kabupaten Tana Toraja	179 / VII / 2013	02-Jul-13	-
8	Kabupaten Soppeng	332 / IX / 2013	04-Sep-13	-
9	Kabupaten Maros	560 / KPTS / 500 / IX / 2013	09-Sep-13	-
10	Kabupaten Sinjai	627 / 2013	09-Sep-13	-
11	Kabupaten Bulukumba	1046 / X / 2013	07-Okt-13	Sampel IHK
12	Kabupaten Bantaeng	500 / 621 / XII / 2013	13-Des-13	-
13	Kabupaten Enrekang	673 / KEP / XII / 2013	31-Des-13	-
14	Kabupaten Luwu Timur	04 / I / 2014	02-Jan-14	-
15	Kabupaten Takalar	47 / 2014	15-Jan-14	-
16	Kabupaten Barru	171 / ADM.EKO / I / 2014	29-Jan-14	-
17	Kabupaten Toraja Utara	107 / II / 2014	08-Feb-14	-
18	Kabupaten Luwu	No.191/III/2014	18-Mar-14	-
19	Kabupaten Wajo	279 / 2014	20-Mar-14	-
20	Kabupaten Luwu Utara	188.4.45/188/III/2014	20-Mar-14	-
21	Kabupaten Jenepono	87 / 2014	28-Apr-14	-
22	Kabupaten Sidenreng Rappang	200/IV/2014	28-Apr-14	-
23	Kabupaten Kepulauan Selayar	198 / V / 2014	14-Mei-14	-
24	Kabupaten Pinrang	050/291/2014	23-Jun-14	-
25	Kabupaten Gowa	409/X/2014	21-Okt-14	-

Sumber : Bank Indonesia (2014)